



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO : 2 TAHUN 2005

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
3 8 5 1);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Program Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

Tentang Pengelolaan dan Pertanggung
Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
Tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban
Keuangandalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
Tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000